

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN KEBIJAKAN

1. Tinjauan Kebijakan

a. Kebijakan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah pada bagian Pedoman Umum, pengertian kebijakan publik yaitu:

- 1) Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.
- 2) Publik adalah hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.
- 3) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Penelitian ini membahas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2022. Perwal ini berdasarkan uraian di atas merupakan salah satu contoh kebijakan publik. Karena sasaran dari pergub adalah menurunkan angka stunting di wilayah Kota Depok.

Kebijakan merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur tidak hanya aspek *government* yang terkait dengan aparatur negara, tetapi juga aspek *governance* yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik

secara luas. Dalam esensinya, kebijakan adalah serangkaian keputusan atau pilihan tindakan yang langsung memengaruhi pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan publik, seperti yang diungkapkan oleh Hermanto Suaib (2022). Ini mencakup rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara secara umum.

b. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2007 pada bagian Pedoman Umum, dijelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah “Suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan”. Masih berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2007, langkah-langkah implementasi kebijakan publik meliputi:

1. Penyiapan Implementasi Kebijakan (0 s.d 6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi perkara kebijakan, baik dari kalangan pemerintah (birokrasi) maupun publik (masyarakat). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan kepada publik melalui media massa elektronik, media cetak dan temu publik.
2. Implementasi kebijakan publik dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba dengan jangka waktu selama 6 bulan s.d 1 tahun) dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.
3. Implementasi kebijakan publik dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai disertai pengawasan dan pengendalian. Setelah dilakukan implementasi kebijakan selama 3 tahun, dilaksanakan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan (Li et al., 2008).

c. Kebijakan Kesehatan

Kebijakan kesehatan adalah suatu hal yang peduli terhadap pengguna pelayanan kesehatan termasuk manajer dan pekerja kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan, yang pada prakteknya peduli kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah (Massie, 2009).

Sejalan dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan maka peran negara telah bergeser dari sebelumnya adalah sebagai pelaksana pelayanan kesehatan menjadi sebagai regulator yang membuat sebuah kebijakan kesehatan. Tujuan kebijakan bidang kesehatan adalah mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional (Massie, 2009).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan delapan komponen yang harus ada dan menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan:

1. Pendekatan holistik: Kesehatan harus didefinisikan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan tidak boleh hanya fokus pada upaya kuratif, tetapi harus lebih menekankan pada upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif.
2. Partisipasi masyarakat: Keterlibatan masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan, karena partisipasi ini dapat membangun aksi

bersama masyarakat yang menjadi kekuatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan menyelesaikan masalah.

3. Kebijakan publik yang sehat: Setiap kebijakan harus mendukung pembangunan kesehatan yang kondusif dan berorientasi kepada masyarakat.
4. Keadilan (Ekuitas): Layanan kesehatan harus didistribusikan secara merata.
5. Efisiensi: Layanan kesehatan harus proaktif dengan optimalisasi biaya dan teknologi.
6. Kualitas: Pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.
7. Pemberdayaan masyarakat: Optimalisasi kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.
8. Kemandirian (*Self-reliant*): Memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas kesehatan di wilayah mereka sendiri (Fazhira, 2021).

d. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Depok

1) Kebijakan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2022

Pada aturan ini stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Depok, dilakukan percepatan penurunan stunting sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, akademisi, masyarakat, dunia

industri, media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan Stunting dan melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan bersama Pemangku Kepentingan yang berkesinambungan. Peraturan ini ditujukan untuk dapat melakukan penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS sebagai organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting pada tingkat Daerah Kota, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan tugas. Selain itu Peraturan ini juga bertujuan untuk melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting, melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan Stunting, mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting serta mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah- langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target penurunan prevalensi Stunting di Kota Depok yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting adalah kegiatan Percepatan Penurunan Stunting yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat dan daerah.

Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

2) Strategi Walikota Depok

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target penurunan prevalensi Stunting di Daerah Kota Depok yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Target penurunan prevalensi Stunting di Daerah Kota Depok dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui 5 (lima) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting meliputi peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku serta peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, koordinasi, dan konsolidasi Pemerintah Daerah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui kegiatan Penanggulangan Stunting Terpadu. Kegiatan Penanggulangan Stunting Terpadu meliputi antara lain melakukan kegiatan penguatan manajemen data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana, melakukan kegiatan pencegahan antara lain melalui kampanye perubahan perilaku dan pendampingan keluarga berisiko, melakukan kegiatan deteksi dini melalui skrining dan surveilans, melakukan kegiatan penanganan melalui penanganan kasus stunting terintegrasi; dan/atau melakukan kegiatan lain yang melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Upaya intervensi spesifik dan sasaran percepatan penurunan Stunting melalui peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik meliputi:

1. pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK);
2. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil paling sedikit 90 tablet selama masa kehamilan;
3. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri paling sedikit 52 (lima puluh dua) tablet selama 1 (satu) tahun;
4. pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan;
5. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-23 bulan;
6. pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) dengan gizi buruk;
7. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak Balita;
8. pemberian tambahan asupan gizi pada anak Balita dengan gizi kurang; dan pemberian imunisasi lengkap pada anak Balita.

Kemudian upaya intervensi sensitif dan sasaran percepatan penurunan Stunting melalui peningkatan konvergensi Intervensi Sensitif meliputi:

1. pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;

2. pemberian konseling pada keluarga berisiko;
3. pelayanan pra nikah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
4. pemberian akses air minum yang layak dan aman pada rumah tangga berisiko;
5. pemberian akses sanitasi (air limbah domestik) layak pada rumah tangga berisiko;
6. pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
7. pendampingan pada keluarga berisiko stunting;
8. pemberian Bantuan Tunai Bersyarat pada keluarga berisiko stunting yang miskin dan rentan;
9. sosialisasi, edukasi dan kampanye pencegahan stunting;
10. pemberian Bantuan Sosial Pangan pada keluarga berisiko stunting yang miskin dan rentan;
11. pelaksanaan kegiatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau *Open Defecation Free* (ODF); dan
12. peningkatan literasi gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dasar.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

1. remaja;
2. calon pengantin;
3. ibu hamil;
4. ibu menyusui; dan
5. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Kelompok sasaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud adalah masyarakat Daerah Kota Depok yang sudah terdata maupun yang belum terdata.

3) Kerangka Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah sebagaimana agenda pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 terkait pencegahan dan penanganan stunting meliputi:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan;
3. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah;
5. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
6. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam;
7. Memperkuat pemerintahan desa;
8. Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak;
9. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara; Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Salah satu Program Juara yang dicanangkan dan diimplementasikan dalam rangka percepatan penurunan stunting adalah Ibu dan Anak Juara, yang dilaksanakan melalui pelayanan Ojek Makanan Bayi dan Balita (OMABA) OMABA (Ojek Makanan Bayi dan Balita). Program ini berupa layanan antar makanan bergizi bagi ibu hamil, bayi dan balita meliputi OMABA pada ibu hamil (pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan sesuai standar), OMABA pada balita (pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, ASI eksklusif, MP ASI dan pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan dasar lokal), dan OMABA mendukung pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk pemberian tablet penambah darah.

4) Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting

Rencana aksi daerah penurunan stunting di Jawa Barat memuat dan kegiatan prioritas merupakan satu kesatuan utuh dan konvergen dalam mencapai tujuan serta target yang telah ditetapkan. kegiatan prioritas meliputi aspek: 5 pilar-8 aksi

konvergensi sebagai wujud penguatan tata kelola serta intervensi prioritas gizi spesifik dan sensitif.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan keluarga berisiko Stunting. Tujuan Rencana Aksi Daerah adalah:

1. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan Stunting tingkat Daerah Kota, Kecamatan, Kelurahan dan bersama Pemangku Kepentingan yang berkesinambungan;
2. melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan Stunting;
3. melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
4. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan Stunting;
5. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting; dan
6. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan Stunting.

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud diatas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

1. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
2. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
3. pendampingan bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);

4. surveilans keluarga berisiko Stunting;
5. audit kasus Stunting;
6. perencanaan dan penganggaran;
7. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Rencana Aksi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. Rencana Aksi Daerah mengacu pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

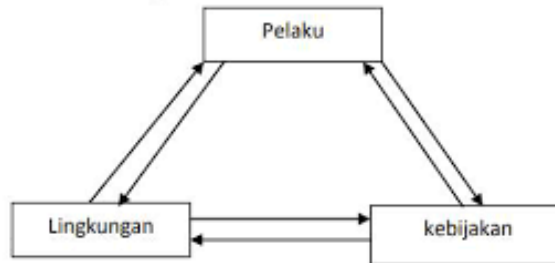
d. Sistem Komponen Kebijakan

Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan memiliki hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut digambarkan dalam Gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan

Tiga elemen sistem kebijakan



Sumber: Dunn (2004)

Dari Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah sistem, kebijakan merupakan sesuatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling terkait dan bukan komponen yang berdiri sendiri. Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan (Fazhira, 2021).

B. Tinjauan Teori

1. Teori

a. Implementasi Kebijakan

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973), yang dikutip oleh Agustino (2006), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai keputusan tetap yang ditandai dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari para pembuat kebijakan dan mereka yang tunduk pada keputusan tersebut. Pendekatan ini menekankan pada sifat keputusan yang stabil dan berulang dalam konteks

pelaksanaannya. Sementara itu, Carl Friedrich (1969), seperti yang dikutip oleh Agustino (2006), menggambarkan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, terutama ketika menghadapi hambatan dan tantangan, dengan tujuan untuk mengatasinya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menekankan pada aspek dinamis dan proaktif dari proses kebijakan dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam lingkungan yang berubah.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan melibatkan proses sinergis, kompromi, dan kadang-kadang kompetisi di antara berbagai aktor dan faktor yang berperan dalam menyusun keputusan yang efektif untuk kepentingan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan (Li et al., 2008).

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam Wahab (2008), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Model Implementasi Kebijakan Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Menurut Edward George III, yang dijelaskan oleh Wahab (2008), terdapat empat faktor utama yang berperan dalam efektivitas implementasi kebijakan. Berikut empat indikator dijelaskan dibawah ini:

1) Komunikasi

Penyampaian informasi yang jelas dan efektif mengenai kebijakan kepada semua pihak yang terlibat sangatlah penting. Proses transmisi informasi yang baik dapat meminimalisir kesalahpahaman dan distorsi selama implementasi. Selain itu, pesan yang disampaikan haruslah jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh semua pihak, sehingga bahasa yang rumit atau istilah yang tidak familiar sebaiknya dihindari. Konsistensi dalam instruksi dan arahan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan juga merupakan aspek penting. Instruksi yang konsisten dan tidak saling bertentangan akan memastikan kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan.

2) Sumber daya

Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan ketersediaan staf yang kompeten dan memadai dalam jumlahnya. Dalam hal ini, kualitas staf lebih diutamakan daripada kuantitas. Selain itu, pelaksana kebijakan harus memiliki akses terhadap informasi yang memadai terkait dengan kebijakan, termasuk tujuan, sasaran, dan panduan implementasi. Wewenang yang cukup dan akses

terhadap fasilitas yang memadai juga sangat diperlukan agar pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

3) Disposisi/ Sikap Pelaksana

Pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebijakan dan bersedia melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kejujuran dalam bekerja dan transparansi dalam menjalankan tugas juga merupakan elemen penting. Selain itu, pelaksana kebijakan harus mematuhi semua peraturan dan prosedur yang terkait dengan kebijakan. Sifat demokratis, yang mencakup keterbukaan terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak serta kesediaan untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat, juga sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk memastikan kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan. Namun, struktur organisasi yang terlalu kompleks dan terfragmentasi dapat menghambat koordinasi dan komunikasi antar unit, sehingga menyebabkan inefisiensi dalam implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Model Edwards III memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor tersebut dan merancang strategi yang efektif guna meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

C. Konsep Kunci

Konsep kunci merupakan gagasan atau ide pokok yang menjadi inti atau fokus dalam suatu pemahaman atau teori tertentu. Konsep kunci digunakan untuk merangkum atau menggambarkan inti dari suatu konsep atau pengetahuan yang kompleks dalam memahami dan menyederhanakan informasi untuk memudahkan pemahaman. Konsep kunci dalam penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan

Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Depok”.

1. Implementasi kebijakan: adalah salah satu tahapan dalam siklus kebijakan publik. Tahapan ini berisi kegiatan dalam melaksanakan suatu program.
2. Perwal Kota Depok Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Depok.
3. Dimensi implementasi Kebijakan Edward III
 - a) Komunika isi
 - b) Sumber daya
 - c) Sikap pelaksana/Disposisi
 - d) Struktur Birokrasi

D. Kerangka Berpikir

Dalam Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta (2022), kerangka berpikir merupakan “Suatu model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan mengenai suatu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya”. Penentuan kerangka berfikir sangat penting agar dapat menggambarkan fokus permasalahan yang terjadi. Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan kesehatan mengenai cukup tingginya angka kasus stunting di wilayah Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok. Untuk memahami sejauh mana kebijakan penurunan stunting telah diimplementasikan dengan efektif, diperlukan penelitian yang mendalam dan komprehensif. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan model Edwards III sebagai kerangka analisisnya.

Model Edwards III menawarkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor ini mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan

menggunakan model ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana kebijakan penurunan stunting diterapkan di lapangan dan mengidentifikasi hambatan serta faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilannya.

Pemilihan model Edwards III didasarkan pada keyakinan bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan dikomunikasikan, sumber daya yang tersedia, sikap dan komitmen para pelaksana, serta bagaimana struktur birokrasi mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan menganalisis setiap komponen ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas kebijakan penurunan stunting serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaannya di masa depan.

Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil mengurangi angka stunting, tetapi juga untuk memahami dinamika di balik implementasi kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan dan pelaksana di berbagai tingkatan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam upaya mengatasi masalah stunting di Indonesia. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 4 variabel yang akan diuraikan peneliti dalam kerangka berpikir berikut:

Gambar 2.2

BAGAN KERANGKA BERPIKIR



Sumber: Diolah Penulis, 2024

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, situasi, atau peristiwa sebagaimana adanya. Pendekatan ini berfokus pada pengungkapan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan dan memberikan gambaran objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, yang melibatkan studi mendalam mengenai individu, organisasi, program kegiatan, atau lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi atau gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang suatu entitas, sehingga data yang dihasilkan dapat dianalisis lebih lanjut untuk pengembangan teori (Fazhira, 2021).

Menurut Sugiyono (2014), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang biasanya dimulai dengan hipotesis dan menggunakan data statistik untuk menguji teori yang ada. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memulai dengan pengumpulan data dari lapangan, menggunakan teori yang ada untuk membantu menjelaskan temuan, dan akhirnya menghasilkan teori baru berdasarkan hasil analisis. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan perspektif partisipan dalam lingkungan alami mereka. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, emosi, dan kompleksitas yang mungkin tidak terungkap melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Bungin (2003), metode analisis dalam penelitian kualitatif bersifat integratif dan konseptual. Metode ini melibatkan proses menemukan,

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data dari dokumen atau catatan lapangan untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi dari data tersebut. Analisis kualitatif tidak hanya mencari pola atau tema dalam data, tetapi juga mencoba memahami bagaimana dan mengapa pola tersebut muncul. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih dalam terhadap subjek yang diteliti, menggali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan persepsi individu, serta memahami dinamika sosial yang lebih kompleks. Melalui teknik-teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual mengenai fenomena yang sedang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Iskandar (2008), merujuk pada situasi dan kondisi lingkungan serta tempat yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Pemilihan lokasi penelitian bukanlah hal yang sepele, karena menentukan di mana penelitian akan dilaksanakan dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. (Moleong, 2017) menyatakan bahwa penentuan lokasi penelitian sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan teori substantif yang relevan serta melakukan eksplorasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian lapangan awal ini membantu peneliti memahami kondisi nyata di lokasi yang diusulkan, memastikan bahwa data yang dikumpulkan nanti akan relevan dan akurat. Selain itu, aspek-aspek praktis seperti keterbatasan geografis, ketersediaan waktu, biaya, dan tenaga juga harus dipertimbangkan. Misalnya, lokasi yang terlalu jauh atau sulit diakses mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya dan waktu, yang bisa menghambat kelancaran penelitian.

Menurut Nasution (2003), lokasi penelitian mengacu pada tempat atau konteks sosial tertentu yang menjadi fokus studi. Lokasi ini ditandai oleh tiga unsur utama: pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Pelaku merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang diteliti. Tempat adalah

lingkungan fisik atau sosial di mana interaksi terjadi, dan kegiatan mencakup tindakan atau perilaku yang dapat diamati dan dianalisis. Memahami interaksi antara pelaku, tempat, dan kegiatan adalah esensi dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menangkap dinamika sosial secara mendalam. Dalam praktiknya, peneliti harus memilih lokasi yang menawarkan akses mudah dan data yang kaya. Misalnya, dalam studi tentang interaksi sosial di sekolah, peneliti mungkin memilih sekolah dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian di lokasi seperti ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sehari-hari, mengumpulkan data melalui wawancara dengan siswa dan staf, serta mengkaji dokumen terkait.

Secara keseluruhan, pemilihan lokasi penelitian harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih benar-benar mendukung tujuan penelitian. Ini melibatkan penyeimbangan antara teori dan praktik, serta mengatasi kendala-kendala praktis untuk mencapai hasil yang valid dan bermakna. Dalam melakukan Penelitian ini, Penulis Melakukan Penelitian dengan mengambil lokasi di Kelurahan Pasir Putih dan UPT Puskesmas Pasir Putih, Jl. Raya Pasir Putih No.1, RW.6, Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16519.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan yang berisi kumpulan fakta yang dikumpulkan untuk tujuan analisis dan interpretasi. Dalam konteks keilmuan, fakta-fakta ini dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi data yang dapat dipaparkan dengan jelas dan tepat, sehingga dapat dimengerti oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang komprehensif dan mendalam.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama. Ini berarti bahwa data dikumpulkan langsung dari orang atau objek yang diteliti melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, observasi, atau kuesioner. Narasumber atau informan dalam hal ini sering disebut sebagai responden, yaitu individu atau kelompok yang menyediakan informasi langsung kepada peneliti. Data primer sangat penting karena memberikan informasi yang spesifik dan relevan dengan konteks penelitian. Misalnya, dalam penelitian sosial, wawancara dengan responden dapat memberikan wawasan mendalam tentang perilaku, motivasi, atau pengalaman pribadi yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Pengumpulan data primer biasanya memerlukan interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan kaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung kebutuhan data primer dan biasanya diperoleh dari sumber yang sudah ada. Sumber-sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, data statistik, dan berbagai publikasi lainnya. Data sekunder memainkan peran penting dalam memberikan konteks, latar belakang, dan pembandingan bagi data primer. Misalnya, data sekunder dapat digunakan untuk memahami tren historis, mengkaji literatur yang ada, atau memvalidasi temuan dari data primer. Penggunaan data sekunder seringkali lebih efisien karena data tersebut sudah tersedia dan dapat diakses tanpa perlu melakukan pengumpulan data lapangan yang memakan waktu dan biaya. Namun, penting bagi peneliti untuk menilai kredibilitas dan relevansi sumber data sekunder untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan valid dan dapat dipercaya.

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang fenomena yang

diteliti. Data primer memberikan detail dan keunikan yang spesifik dari penelitian langsung, sementara data sekunder menyediakan konteks dan latar belakang yang lebih luas. Keduanya saling melengkapi dan memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan interpretasi data yang lebih mendalam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing teknik ini memberikan pendekatan yang berbeda untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mendukung analisis dan temuan penelitian.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik ini bisa dilakukan dengan tatap muka, yang memungkinkan peneliti untuk bercakap-cakap langsung dengan responden. Wawancara dengan pedoman umum melibatkan penggunaan panduan yang mencantumkan isu-isu utama yang perlu dibahas, namun tidak menetapkan urutan pertanyaan secara ketat atau mengharuskan bentuk pertanyaan yang eksplisit. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang mendalam dan memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pandangan mereka secara rinci. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat, seperti pejabat kelurahan, staf puskesmas, dan anggota masyarakat, guna mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang upaya penurunan stunting (Fazhira, 2021).

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini,

observasi digunakan untuk memantau secara langsung strategi yang diterapkan oleh Kelurahan dan UPT Puskesmas Pasir Putih dalam menurunkan angka stunting. Melalui observasi, peneliti dapat melihat dan mencatat tindakan, perilaku, dan situasi secara real-time, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang bagaimana strategi-strategi tersebut diterapkan dan berdampak pada masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengakses berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Ini mencakup buku, laporan, dokumen resmi, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang menyediakan informasi kontekstual dan historis yang mendukung analisis penelitian. Selain itu, dokumentasi juga dapat mencakup pengumpulan materi visual seperti foto, video, dan rekaman lainnya yang membantu mengilustrasikan dan mendukung temuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan yang tidak bisa diperoleh melalui observasi atau wawancara, seperti laporan kesehatan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan catatan program intervensi stunting. Dengan menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Observasi memberikan data empiris langsung, wawancara menyediakan wawasan subjektif dari berbagai informan, dan dokumentasi menambahkan konteks dan informasi tertulis yang mendukung keseluruhan analisis. Pendekatan triangulasi ini meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Pada konteks penelitian ini mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, peneliti mendapatkan dokumen resmi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Pasir Putih mengenai Rekap Data Status Penimbangan Balita untuk periode Februari 2023 dan Februari 2024. Dokumen ini memuat detail jumlah dan nama posyandu yang ada di wilayah UPTD Puskesmas Pasir Putih serta jumlah balita

dengan status stunting, wasting, dan underweight. Kondisi stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan standar tinggi untuk usianya. Ini adalah indikasi dari malnutrisi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam jangka panjang. Selain itu wasting merupakan kondisi di mana berat badan anak sangat rendah dibandingkan dengan tinggi badannya. Ini menunjukkan adanya penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu singkat, seringkali akibat kekurangan gizi akut atau penyakit. Sedangkan underweight ialah kondisi di mana berat badan anak lebih rendah dibandingkan dengan standar berat untuk usianya. Ini bisa disebabkan oleh wasting, stunting, atau kombinasi keduanya, dan mencerminkan masalah gizi secara umum. Perbandingan antara kondisi tahun 2023 dan 2024 menunjukkan hasil riil di lapangan yang mencerminkan perubahan dan perkembangan status gizi balita di wilayah Kelurahan Pasir Putih. Hasil ini dapat menjadi acuan peneliti dalam menganalisis efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Selain itu, data ini membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan program intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai objek penelitian. Informan, atau narasumber, dalam konteks penelitian ini adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman khusus tentang topik yang diteliti. Peneliti memilih informan melalui wawancara langsung, di mana informan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dan detail yang spesifik terkait dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, peneliti dapat memastikan bahwa setiap informan dipilih

berdasarkan kriteria dan tujuan yang jelas, yang mencakup kemampuan mereka dalam menguasai dan memahami objek penelitian dengan baik.

Teknik purposive sampling ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang mendalam dan relevan. Hal ini berbeda dengan teknik sampling acak yang mungkin menghasilkan sampel yang kurang tepat atau tidak cukup informatif. Dalam penelitian ini, informan dipilih karena mereka memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman mendalam tentang strategi yang diterapkan oleh Kelurahan dan UPT Puskesmas Pasir Putih dalam menurunkan angka stunting. Dengan memilih informan secara purposive, peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan terperinci. Informan yang dipilih dengan teknik ini diharapkan dapat memberikan data yang mendalam dan kontekstual, yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta menghasilkan temuan yang lebih valid dan dapat diandalkan.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono (2013), teknik ini digunakan untuk memilih individu yang dianggap paling memahami hal yang ingin diteliti atau memiliki posisi yang memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Misalnya, individu tersebut mungkin memiliki pengetahuan mendalam atau akses khusus yang relevan dengan topik penelitian. Alasan utama peneliti memilih purposive sampling adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang nyata dan relevan dengan topik penelitian. Misalnya, dengan mewawancarai individu yang memiliki pengetahuan khusus atau pengalaman langsung terkait dengan masalah yang diteliti, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan akurat. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat diandalkan.

Peneliti memilih menggunakan purposive sampling karena teknik ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat relevan dan akurat. Dengan memilih informan yang benar-benar menguasai bidang atau topik tertentu, peneliti

dapat memperoleh informasi yang detail dan spesifik, yang mungkin tidak bisa didapatkan melalui teknik sampling lainnya. Informan dipilih berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti keahlian, pengalaman, atau posisi mereka dalam organisasi atau masyarakat. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari beberapa informan yang dipilih secara purposive. Setiap informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yang memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam, yang memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendetail. Informan yang dipilih yakni Pegawai ASN Kelurahan dan Puskesmas Pasir Putih, Tim Ibu-Ibu penggerak PKK, masyarakat wilayah Kelurahan Pasir Putih yang terdaftar menjadi anggota posyandu di kelurahan pasir putih. Peneliti memilih informan yang dianggap mewakili fokus penelitian secara menyeluruh. Informan-informan ini dipilih dengan cermat untuk memberikan wawasan yang relevan dan beragam terkait dengan topik penelitian. Dengan demikian, setiap informan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang strategi kelurahan dan UPT Puskesmas Pasir Putih dalam menangani masalah penurunan angka stunting. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan terhadap masalah yang diteliti ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Narasumber	Alasan dipih menjadi <i>key informant</i>	Jumlah
1	Lurah Pasir Putih	Berkaitan dengan pengambil keputusan dalam melaksanakan koordinasi antar <i>stakeholder</i>	1 Orang

2	Puskesmas Pasir Putih	Berkaitan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dengan stakeholder terkait dan juga pembinaan kepada Kader Posyandu	1 Orang
3	Seksi Kesehatan Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih	Berkaitan dengan pendataan dan advokasi kebijakan kepada masyarakat dari kelurahan pasir putih	1 Orang
4	Ketua Bidang Penanganan Stunting Puskesmas Pasir Putih	Berkaitan dengan mendata dan memonitoring program kebijakan sesuai SOP gizi yang berlaku	1 Orang
5	Duta Penanganan Stunting Kelurahan Pasir Putih	Berkaitan dengan menyampaikan informasi dan monitoring secara langsung dilapangan	1 Orang
6	Kader Posyandu Kelurahan Pasir Putih	Berkaitan dengan mengedukasi sesuai SOP secara langsung kepada masyarakat anggota posyandu	3 Orang
7	Masyarakat	Berkaitan sebagai penerima manfaat utama dari program stunting, memiliki pengalaman langsung yang memberikan informasi berharga tentang efektivitas program, dan umpan balik mereka dapat membantu dalam mengevaluasi program,	3 Orang

Jumlah		10 Orang
--------	--	-------------

Sumber: Diolah penulis, 2024

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada peran strategis masing-masing pihak dalam implementasi kebijakan tersebut. Setiap informan memiliki tanggung jawab yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan stunting, sehingga memberikan perspektif yang komprehensif dan mendalam. Lurah Pasir Putih memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antar stakeholder di tingkat kelurahan. Sebagai pemimpin lokal, Lurah memastikan kebijakan dan program stunting yang diterapkan di lapangan berjalan sesuai rencana. Koordinasi yang baik antar-stakeholder merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan kebijakan, dan Lurah berfungsi sebagai penggerak utama dalam menyatukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam menurunkan angka stunting. Seksi Kesehatan Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih berhubungan dengan pendataan dan advokasi kebijakan kepada masyarakat. Mereka memiliki peran kunci dalam mengumpulkan data yang akurat tentang kondisi kesehatan masyarakat dan menyampaikan kebijakan yang ada. Pendekatan yang mereka gunakan dalam mendata dan mengadvokasi kebijakan sangat berpengaruh pada penerimaan dan keberhasilan program di tingkat masyarakat.

Puskesmas Pasir Putih bertanggung jawab atas koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan berbagai stakeholder terkait, serta pembinaan kepada kader posyandu. Puskesmas memainkan peran sentral dalam implementasi program kesehatan di tingkat lokal, termasuk program penanganan stunting. Dengan demikian, informasi dari Puskesmas memberikan wawasan tentang efektivitas kolaborasi lintas sektor dan dukungan teknis yang diberikan kepada para kader dan tenaga kesehatan di lapangan. Ketua Bidang Penanganan Stunting Puskesmas Pasir Putih** fokus pada pendataan dan monitoring program kebijakan sesuai SOP gizi yang berlaku. Data yang dikumpulkan dan dipantau oleh Ketua Bidang ini sangat krusial dalam mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang

memerlukan perbaikan. Duta Penanganan Stunting Kelurahan Pasir Putih** memainkan peran dalam menyampaikan informasi dan melakukan monitoring langsung di lapangan. Mereka adalah penghubung antara program kebijakan dan masyarakat, memastikan bahwa informasi mengenai stunting sampai ke sasaran dengan tepat dan bahwa implementasi di lapangan sesuai dengan rencana.

Kader Posyandu Kelurahan Pasir Putih berperan langsung mengedukasi masyarakat sesuai SOP, mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan program di lapangan. Kader memiliki interaksi langsung dengan masyarakat, memberikan edukasi, dan melakukan pemantauan rutin yang sangat penting dalam upaya penurunan stunting. Masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari program stunting, memberikan informasi berharga mengenai efektivitas program yang dijalankan. Pengalaman langsung mereka memberikan umpan balik yang penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kebijakan yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam jangka panjang. Dengan melibatkan berbagai informan ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta hasil yang dicapai dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan interaktif, dilakukan sepanjang periode pengumpulan data hingga setelahnya. Peneliti kualitatif mulai menganalisis data sejak tahap awal pengumpulan, misalnya saat wawancara berlangsung, dengan secara langsung memeriksa dan mengevaluasi tanggapan yang diberikan oleh partisipan. Selama wawancara, peneliti tidak hanya mencatat jawaban, tetapi juga mulai menginterpretasikan dan mengkontekstualisasikan informasi yang diberikan oleh responden. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi poin-poin penting, pola, atau tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Jika jawaban yang diberikan oleh informan masih kurang memadai atau kurang jelas, peneliti dapat segera mengajukan pertanyaan tambahan atau klarifikasi untuk menggali

informasi lebih dalam. Proses ini berlanjut secara iteratif, di mana peneliti menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban sebelumnya untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan lebih relevan.

Setelah wawancara atau sesi pengumpulan data selesai, peneliti melanjutkan analisis secara lebih mendalam. Data yang telah terkumpul kemudian diorganisasikan, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk menemukan hubungan dan makna yang lebih dalam. Tahap ini melibatkan penyusunan kode untuk tema-tema tertentu, mengidentifikasi hubungan antar tema, dan membangun narasi yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti secara komprehensif. Proses analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami tanggapan individu, tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman yang holistik tentang konteks sosial yang lebih luas. Peneliti menggabungkan berbagai sumber data, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung lainnya, untuk memastikan bahwa analisis mereka didasarkan pada bukti yang kuat dan beragam.

Menurut Budiastuti & Bandur (2018), tujuan akhir dari proses analisis ini adalah untuk mencapai data yang kredibel dan valid. Data dianggap kredibel ketika peneliti merasa telah mendapatkan jawaban yang memadai dan representatif dari partisipan, serta dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan jelas. Hal ini seringkali memerlukan peneliti untuk terus mengajukan pertanyaan lanjutan hingga informasi yang diperoleh benar-benar memuaskan dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dinamis dan reflektif, memungkinkan peneliti untuk terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan bermakna tentang subjek penelitian, yang didukung oleh data yang kaya dan analisis yang mendetail. Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan langkah awal dalam proses analisis. Data yang terkumpul dari lapangan dapat beragam dan kompleks, sehingga perlu

direduksi agar lebih mudah diolah dan dipahami. Reduksi data melibatkan mengeksplorasi informasi untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta memfokuskan perhatian pada hal-hal yang penting dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk mengekstraksi informasi terkait jumlah anak stunting di wilayah Kelurahan Pasir Putih Kota Depok selama satu tahun terakhir.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah diolah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, diagram, flowchart, atau tabel. Namun, dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling umum adalah melalui teks naratif. Peneliti akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk teks yang menjelaskan temuan secara rinci, dan dapat disertai dengan tabel atau gambar untuk memperjelas dan mendukung interpretasi data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses untuk membuat interpretasi dan generalisasi atas temuan yang diperoleh dari analisis data. Kesimpulan yang diambil dapat mencerminkan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, namun demikian, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan juga dapat menghasilkan temuan baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian, serta hubungan kausal atau interaktif antara berbagai variabel yang diteliti. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dan dapat membantu dalam menyusun rekomendasi atau implikasi kebijakan yang relevan (Rezka, 2020).

Pada konteks penelitian ini dalam tahapan pengambilan data penelitian di lapangan melibatkan serangkaian tahapan pengambilan data yang cermat. Setelah menentukan lokasi dan para *key informant*, sebelum pengambilan data peneliti

menyusun pedoman wawancara yang terstruktur, menyiapkan alat perekam, dan lembar observasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen terkait kebijakan penurunan stunting hasil rill stunting di wilayah Kelurahan Pasir Putih. Hasil wawancara dicatat secara verbatim atau diringkas dengan poin-poin penting, sementara hasil observasi disimpan dalam bentuk catatan lapangan dan foto-foto. Dokumen-dokumen terkait juga disimpan dengan rapi.

Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan validasi data melalui triangulasi dan pengecekan ulang data dengan informan. Data yang telah divalidasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, seperti analisis naratif. Dari hasil analisis data tersebut, peneliti menarik kesimpulan tentang implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Kesimpulan ini penting untuk memahami efektivitas dan dampak kebijakan tersebut terhadap penurunan angka stunting di lokasi penelitian. Dengan demikian, tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian integral dari proses analisis data dalam penelitian kualitatif yang membantu peneliti dalam memahami, menginterpretasikan, dan memberikan makna terhadap informasi yang diperoleh dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi atau Gambaran Umum Lokus Penelitian di Kelurahan Pasir Putih

Kelurahan Pasir Putih merupakan salah satu Kelurahan yang ada di wilayah Kota Depok. Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang diangkat oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara geografis Kelurahan Pasir Putih terletak Jalan Raya Pasir putih N0. 1 Rt. 004/002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kelurahan Pasir Putih mudah diakses dan memiliki jalan masuk yang luas dan dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dan mobil. Selain itu, Kelurahan Pasir Putih juga dikelilingi oleh beberapa sekolah dasar, sehingga menjadi wilayah yang cukup ramai.

Di wilayah kelurahan Pasir Putih terdapat sebanyak 12 RW dan 77 RT dengan komposisi penduduk yang beragam. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 13 dari Bagian Keenam Peraturan Daerah Kota Depok menjelaskan kedudukan dan peran kelurahan dalam struktur pemerintahan kecamatan. Berikut adalah poin-poin utama yang diatur dalam pasal tersebut:

1. Fungsi Kelurahan: Kelurahan merupakan bagian dari perangkat kecamatan yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas Camat. Sebagai entitas administratif, kelurahan memainkan peran penting dalam mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh kecamatan, memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di tingkat lokal berjalan dengan efektif.
2. Pimpinan Kelurahan: Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Lurah bertindak sebagai perangkat kecamatan dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Camat. Dengan demikian, Lurah harus memastikan bahwa semua tugas dan fungsi kelurahan dijalankan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.
3. Pengangkatan Lurah: Lurah diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi kualifikasi tertentu. Proses pengangkatan dilakukan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah. Ini memastikan bahwa Lurah yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik di tingkat kelurahan.
4. Wilayah Administratif Kelurahan: Kelurahan sebagai wilayah kerja administratif terdiri dari beberapa bagian yang telah ditetapkan. Penetapan ini merujuk pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok. Peraturan ini mendefinisikan batas-batas dan struktur wilayah kerja kelurahan, sehingga setiap kelurahan memiliki kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi administratifnya.

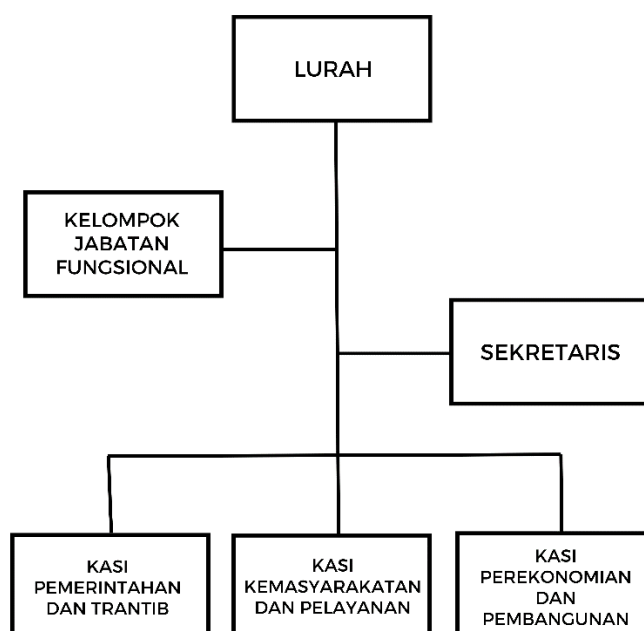
Secara keseluruhan, kelurahan merupakan unit penting dalam struktur pemerintahan kecamatan yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas Camat. Dipimpin oleh Lurah yang kompeten, kelurahan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat dijalankan dengan baik di tingkat lokal, mendekatkan

pelayanan publik kepada masyarakat dan memperkuat administrasi pemerintahan di wilayah kerjanya.

Kelurahan Pasir Putih merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sawangan Kota Depok. Berdasarkan Peraturan wali kota Depok nomor 5 tahun 2022 tentang peraturan wali kota tentang perubahan kedua atas peraturan wali kota nomor 111 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kelurahan Pasir Putih mempunyai tugas pokok membantu Kecamatan dan Walikota dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Susunan Organisasi Kelurahan Pasir Putih sebagai berikut:

Gambar: 4.1

Susunan Organisasi Kelurahan Pasir Putih



Sumber: Kelurahan Pasir Putih, 2024

Dalam struktur pemerintahan kelurahan, Lurah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi berbagai posisi kunci yang masing-masing memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik di wilayahnya. Berikut adalah rincian posisi yang berada di bawah tanggung jawab seorang Lurah:

- 1) Sekretaris Kelurahan: Sekretaris berfungsi sebagai asisten utama Lurah dalam urusan administrasi dan manajerial. Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, termasuk koordinasi kegiatan, penyusunan laporan, dan dukungan operasional bagi Lurah serta seluruh perangkat kelurahan lainnya. Mereka memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur administratif berjalan dengan lancar dan efisien.
- 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban: Posisi ini bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di tingkat kelurahan, termasuk penegakan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Mereka memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kelurahan, serta bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian dan satpol PP untuk menangani masalah-masalah sosial dan keamanan.
- 3) Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan: Kepala Seksi ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi program-program pembangunan ekonomi di kelurahan. Ini mencakup pengembangan infrastruktur, promosi usaha kecil dan menengah, serta implementasi proyek-proyek pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga kelurahan.
- 4) Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan: Posisi ini fokus pada aspek sosial dan layanan publik di kelurahan. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk

program-program kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, mereka memastikan bahwa layanan publik seperti pengelolaan administrasi kependudukan dan pelayanan sosial lainnya berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 5) Jabatan Fungsional: Selain posisi-posisi struktural, terdapat juga jabatan fungsional yang terdiri dari pegawai dengan keahlian khusus yang mendukung fungsi kelurahan. Jabatan fungsional ini mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan teknis lainnya. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan layanan yang lebih spesifik dan teknis kepada masyarakat, serta mendukung implementasi kebijakan kelurahan secara efektif.

Dengan struktur yang terdiri dari berbagai posisi kunci ini, Lurah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek pemerintahan kelurahan berjalan dengan baik dan harmonis. Melalui koordinasi dan pengawasan yang efektif, Lurah dan perangkat kelurahan dapat bekerja sama untuk memberikan layanan yang optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya.

Kelurahan Pasir Putih menjadi lokus yang relevan untuk penelitian ini, karena karakteristik demografis dan sosialnya yang unik. Kelurahan ini memiliki tantangan kesehatan yang khas, termasuk prevalensi stunting pada anak-anak, yang merupakan masalah kesehatan publik yang penting. Profil demografis yang beragam memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penurunan stunting, seperti tingkat dan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kondisi ekonomi.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan penurunan stunting diimplementasikan di Kelurahan Pasir Putih, dengan fokus pada efektivitas program dan intervensi yang dilakukan oleh kelurahan dan puskesmas setempat. Puskesmas Pasir Putih, sebagai pusat layanan kesehatan dasar, memiliki peran krusial dalam menjalankan program-program kesehatan ibu dan anak, termasuk

penyuluhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan juga menjadi aspek penting yang akan diteliti.

2. Data Hasil Penelitian

Di Indonesia, stunting merupakan masalah yang serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi. Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia menggambarkan sebuah kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak dalam usia pertumbuhan, yakni tinggi badan anak menjadi lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting bukan hanya sekedar masalah fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang pada perkembangan kognitif dan kesehatan anak di masa depan.

Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh bayi atau janin selama masa 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Masa ini dikenal sebagai periode emas pertumbuhan anak, di mana asupan gizi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk perkembangan otak dan tubuh yang optimal. Jika pada masa ini anak tidak mendapatkan gizi yang memadai, maka risiko terjadinya stunting sangat tinggi, dan dampaknya sulit untuk diperbaiki di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.” Ketentuan ini menegaskan pentingnya upaya terpadu dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah kesehatan, termasuk stunting. Pencegahan stunting memerlukan intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pemerintah Indonesia telah mengakui seriusnya masalah stunting dan menetapkan berbagai program serta kebijakan untuk menurunkan prevalensi stunting. Salah satunya adalah melalui program perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik. Selain itu, program kesehatan ibu dan anak yang fokus pada pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin juga menjadi bagian dari upaya penanggulangan stunting.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam upaya penurunan stunting di tingkat lokal. Seperti halnya di Kelurahan Pasir Putih, peran aktif masyarakat sangatlah penting untuk memastikan efektivitas program-program kesehatan yang telah dicanangkan. Selain intervensi dari pemerintah, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu, keterlibatan kader kesehatan, dan dukungan dari Puskesmas merupakan faktor pendukung yang krusial. Kegiatan Posyandu, yang sering kali melibatkan ibu-ibu dan tokoh masyarakat setempat, menjadi sarana untuk memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi gizi, dan memastikan imunisasi serta suplementasi gizi berjalan sesuai rencana. Kader-kader kesehatan yang berasal dari masyarakat lokal berperan sebagai jembatan antara program kesehatan pemerintah dan penerapan di lapangan, mereka memberikan penyuluhan dan pemantauan langsung di komunitas. Dukungan dari masyarakat juga terlihat dalam bentuk gotong royong dan solidaritas dalam mendukung keluarga yang membutuhkan bantuan gizi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan warga, memastikan anak-anak di Kelurahan Pasir Putih dapat tumbuh sehat dan optimal.

Implementasi kebijakan penurunan stunting juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Sinergi antara pemerintah serta organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dukungan dari sektor swasta juga dapat membantu dalam penyediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung program-program tersebut. Secara

keseluruhan, upaya untuk menurunkan stunting di Indonesia adalah sebuah tantangan besar yang memerlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, serta dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan prevalensi stunting di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal.

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi kepada para informan di Kelurahan Pasir Putih, Kota Depok. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kepada pihak Kelurahan, Puskesmas, Posyandu, Petugas Kesehatan, para Ibu-Ibu Kader, Ahli Gizi, serta orang tua pendamping balita atau anak stunting. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting kemudian diuraikan berdasarkan perspektif Pelaksanaan Kebijakan Menurut Teori Edward III, yang mencakup empat indikator utama: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana/Disposisi, dan Struktur Birokrasi, sebagaimana uraian dibawah ini.

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam upaya penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait adalah kunci utama. Pemerintah, puskesmas, kader Posyandu, dan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang terstruktur melalui koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan. Informasi mengenai kebijakan penanggulangan stunting harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Terkait hal tersebut Lurah Pasir Putih berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi antara stakeholder terkait di Kelurahan Pasir Putih menyatakan:

”Antara seluruh stakeholder terkait ini, satu sama lain sering berkomunikasi dan sering berkoordinasi untuk penanganan kasus stunting tersebut. Ya, diantaranya itu koordinasi dan komunikasi itu

antara masyarakat, RT, RW, kader Posyandu, Puskesmas, Kelurahan dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Semua sangat-sangat solid dalam penanganan kasus stunting ini.”

Selain itu hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Siti selaku Petugas Gizi dan Penanggungjawab Gizi di Puskesmas Kelurahan Pasir Putih, dimana dalam kolaborasi penanganan stunting ia menyatakan:

”Kemudian dengan, misalnya kader. Artinya masyarakat kan Pihak kelurahan gitu ya. Koordinasi, kader Pokja dan sebagainya. Karena kan yang memang. Apa namanya. Kelompok. Apa ya, kelompok pemberdayaan masyarakat ya namanya ya kan. Mereka juga yang ada di dekat sama sasaran ya. Jadi kita kerjasama untuk. Saling membantu untuk monitoringnya. Ketika kita berikan misalnya edukasi. Ketika kita kasih tau. Misalnya kita berikan makanan tambahan. Bisa dibantu untuk monitoringnya. Dengan lintas sektornya kayak kader-kader. Kader gizi. Kalau dikelurahan. Juga kan ada ya kader pendamping keluarga ya. Apa namanya tuh. Para pendamping keluarga lah ya.”

Dari hasil wawancara berikut mengenai komunikasi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi antar stakeholder berjalan dengan baik dan terstruktur. Lurah Pasir Putih menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat secara rutin berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menangani kasus stunting. Pernyataan ini menunjukkan adanya sinergi yang solid dalam penanganan stunting, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dan saling mendukung. Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Siti, menurutnya koordinasi dengan kader Posyandu memungkinkan pemberian edukasi dan komunikasi dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Kader-kader ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Puskesmas dalam mengawasi dan memastikan bahwa intervensi gizi sampai kepada mereka yang membutuhkan, serta membantu dalam pemantauan perkembangan anak-anak yang berisiko stunting.

Lebih detail mengenai jalan nya proses komunikasi dalam penanganan stunting di, diungkapkan oleh dr. Ratih, yang menyatakan

”Jadi, kalau stunting itu memang gak bisa hanya menjadi program miliknya kesehatan ya, tapi memang menjadi, jadi program dengan semua lintas ya? Jadi, kalau dari puskesmas sendiri, kami dapatkan amanah ya, dari Dinas Kesehatan untuk berperan serta, terhadap penurunan stunting ini kaitannya dengan intervensi spesifik ya. Jadi ada dua intervensi, spesifik dan sensitif ya. Spesifik itu, ya, kita melaksanakan program, yang betul-betul berkaitan langsung ya dengan balita yang stunting dengan balita yang gizi kurang ataupun gizi buruk ya. Kalo yang sensitif ini yang berkaitan dengan lintas sektor ya, misalnya kalau stunting itu kita berkaitan juga dengan apa namanya dengan kesehatan lingkungannya seperti STBM ya, sanitasi total berbasis masyarakat”

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam penanganan stunting di Kelurahan Pasir Putih melibatkan berbagai pihak dan aspek yang saling berhubungan. Penanganan stunting merupakan tantangan yang kompleks dan tidak dapat diserahkan hanya kepada sektor kesehatan. Upaya mengatasi stunting memerlukan keterlibatan berbagai sektor lintas disiplin untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Stunting, yang ditandai oleh kondisi pertumbuhan anak yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis, bukan hanya masalah medis, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya mengatasi stunting harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, melibatkan semua sektor yang relevan. Kerjasama lintas sektor ini tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari ancaman stunting yang dapat membatasi potensi mereka di masa depan.

Puskesmas, sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, mendapatkan mandat dari Dinas Kesehatan untuk berperan aktif dalam penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Dengan adanya intervensi spesifik

dan sensitif, komunikasi yang terjalin antara Puskesmas, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi sangat krusial. Setiap program dan kebijakan harus disosialisasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan peran aktif semua pihak dalam menyukseskan program penurunan stunting. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa efektif komunikasi yang terjalin di antara semua pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menjalankan program-program yang telah dirancang.

Komunikasi yang efektif ini mencakup penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kader-kader kesehatan dan pendamping keluarga memiliki peran krusial dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung. Mereka juga berperan dalam memonitor dan melaporkan perkembangan kasus stunting kepada Puskesmas, sehingga tindakan preventif dan kuratif dapat dilakukan secara tepat. Dengan demikian, terjalinlah sebuah sistem komunikasi yang berkesinambungan dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terstruktur dan koordinasi yang solid antara berbagai pihak di Kelurahan Pasir Putih sangat mendukung implementasi kebijakan penurunan stunting. Keberhasilan komunikasi ini tidak hanya bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, tetapi juga pada mekanisme penyampaian informasi yang efektif, yang memastikan bahwa pesan mengenai pentingnya gizi dan cara-cara mencegah stunting diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini menjadi landasan kuat bagi pencapaian tujuan program penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih.

b. Sumber Daya

Urgensi sumber daya merupakan aspek yang sangat penting. Sumber daya ini mencakup staf, fasilitas, dan informasi, yang semuanya berperan krusial dalam mendukung efektivitas program penurunan stunting. Staf merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi kebijakan penurunan stunting. Di Kelurahan

Pasir Putih, tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, dan kader Posyandu berperan langsung dalam intervensi program stunting. Staf yang kompeten dan terlatih sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pemberian makanan tambahan. Berkaitan dengan pemenuhan SDM sebagai aspek sumber daya, dari hasil wawancara dengan Kader PKK menyatakan:

”[Jadi kurang SDM juga bisa nggak sih bu?] Iya bisa. [Kalau dari RW 06 ini, ada berapa kader bu yang pegang posyandu?] Ada 9 kader. [Dari total seluruh anak?] Dari total seluruh anak 188 balita.”

Selain kekurangan SDM, hasil penelitian juga mengungkapkan dimana sebagian para kader juga kurang memahami dalam penanganan stunting, diungkapkan Ibu Ira selaku orang tua pendamping anak stunting yang mengungkapkan:

“[Berarti SDM yang di ibu-ibu kader Udah kompeten semua atau masih ada yang, bingung nanganin anak stunting?], Yaa begitu sih yang ngasih tau menu makan bukan kadernya, tapi bidan nya. [Jadi kalau kader hanya membantu saja?], Iya yang bantu catat timbangan”

Kemudian berkaitan dengan aspek fasilitas pada indikator sumber daya, dimana fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam penanganan stunting. Diungkapkan oleh Ibu Ubay selaku Ketua Posyandu Mawar 2, RW 08, Kelurahan Pasir Putih, dimana beliau menyatakan:

“Kalau timbangan untuk digital ya ada baik, ukuran juga meter itu digital tapi untuk, sebetulnya kita ada tempat tidur karena memang kemarin sempet posyandunya rusak ya jadi tempat tidur kita rusak untuk saat ini gak ada untuk pemeriksaan tempat tidur untuk ibu hamil.”

Selain itu berkaitan dengan informasi dalam indikator sumber daya menjadi bagian yang tak kalah penting dalam implementasi kebijakan penurunan stunting. Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Diungkapkan Ibu Ubay dimana

mengenai penyampaian informasi terkait program pencegahan stunting di masyarakat, khususnya ke orang tua posyandu, beliau mengungkapkan:

“Biasanya kita penyampaian nya ada di posyandu ya, kayak penyuluhan kayak gitu, ada juga memang kalau Balita nya atau Ibunya tidak membawa anak itu ke posyandu dan memang itu berat badannya kurang atau tingganya kurang seperti anak stunting itu kita datang ke rumahnya untuk menjelaskan seperti itu, misalnya door to door, sweeping kayak begitu. Karena ada program yang namanya sweeping ya, sweeping kita sweeping kayak begitu, kita sampaikan nya seperti itu.”

Gambar 4.2
Posyandu Kelurahan Pasir Putih



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Dari hasil wawancara di atas, jelas terlihat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih sangat bergantung pada pemenuhan dan pengelolaan sumber daya yang mencakup staf, fasilitas, dan informasi. Meningkatkan jumlah dan kompetensi staf, memperbaiki dan

menyediakan fasilitas yang memadai, serta memastikan penyampaian informasi yang efektif dan akurat adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan demikian, upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memberikan hasil yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di Kelurahan Pasir Putih.

c. Sikap Pelaksana/Disposisi

Sikap pelaksana atau disposisi merupakan elemen kunci yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana dapat mencakup pengangkatan birokrat dan intensif yang diberikan kepada mereka. Kedua aspek ini memainkan peran penting dalam motivasi, komitmen, dan kinerja para pelaksana kebijakan di lapangan.

Pengangkatan birokrat yang tepat sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penurunan stunting. Di Kelurahan Pasir Putih, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen para birokrat yang bertanggung jawab. Birokrat yang diangkat harus memiliki pemahaman mendalam tentang isu stunting, kemampuan manajerial yang baik, dan dedikasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diungkapkan Pak Lurah dimana mengenai kemampuan dan komitmen birokrat dalam penurunan stunting, beliau menyatakan:

“Untuk Pemerintah Kota Depok dan juga Dinas Kesehatan sangat merespon terhadap kasus berita stunting yang ada di Kelurahan Pasir Putih dan mereka sangat support terhadap kegiatan-kegiatan dan jangan dilaksanakan oleh pihak kelurahan untuk pencegahan maupun pengurangan angka stunting di Kelurahan Pasir Putih.”

Kemudian berkaitan dengan intensifikasi dalam sikap pelaksana atau disposisi, intensif dalam konteks ini mengacu pada upaya yang lebih intens dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Intensifikasi ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan frekuensi kegiatan, intensifikasi pelatihan bagi kader dan tenaga kesehatan, serta peningkatan monitoring dan

evaluasi secara berkala. Peningkatan frekuensi kegiatan, seperti penyuluhan gizi dan pemeriksaan kesehatan, dapat membantu mendeteksi dan menangani kasus stunting lebih cepat dan lebih efektif. Intensifikasi pelatihan bagi kader Posyandu dan tenaga kesehatan akan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga akan memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat diukur efektivitasnya dan disesuaikan jika diperlukan.

Gambar 4.3
Kegiatan Pelatihan Penanganan Stunting di Kelurahan Pasir Putih



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Terkait aspek intensifikasi adanya pelatihan untuk para kader dalam hal ini birokrat dalam penurunan stunting, dari hasil wawancara diungkapkan oleh Ibu Dewi selaku Kader PKK yang menyatakan:

”[Jadi ibu selain ngurus posyandu juga, nanti juga kalau di sini ada pelatihan ibu suka ikut ya?] Iya, kita bergantian, biar kader semua bisa tambah wawasan.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti selaku Petugas Gizi dan penanggungjawab Gizi di Puskesmas Kelurahan Pasir Putih yang menyatakan:

”Ini udah sering banget ya. Kita ngadain pertemuan edukasi tentang stunting, dikelurahan juga sudah pernah mengundang Ibu balita stunting ya. Sekaligus setelah itu kita konsultasi ya. Konseling. Tapi tidak hanya dengan petugas gizi. Ada petugas sanitasi lingkungan juga. Ada petugas promosi kesehatan juga. Jadi melibatkan diatas program ya. Kita sama-sama. Setelah diberikan penyuluhan. Mereka satu persatu diarahkan konseling. Jadi memang sudah ada itu sudah pernah. Terus pelatihan kadernya juga sudah kan ya. Selama di posyandu. Selama pelayanan di posyandu. Ada petugas gizi kan yang ikut di posyandu. Dan biasanya akan di jaring oleh ibu bidan atau ibu kader. Yang bermasalah akan diarahkan ke kita. Langsung mendapatkan konseling di posyandu.”

Namun pendapat berbeda diungkapkan oleh Orang Tua Pendamping Anak Stunting yang mengungkapkan:

”[Ada bentuk sosialisasi enggak Bu soal stunting begitu, gimana cara ini anak mau makan gitu-gitu?], Iya dikasih tahu. [Tapi caranya gimana suka ada ada pertemuan di kelurahan apa?] Kalau itu belum.”

Dalam konteks implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, sikap pelaksana atau disposisi memainkan peran krusial. Pengangkatan birokrat yang kompeten dan berintegritas, serta pelaksanaan intensif berbagai kegiatan, adalah dua aspek yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program. Pengangkatan birokrat yang tepat dapat memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan, sementara intensifikasi berbagai kegiatan dapat mempercepat dan mengoptimalkan hasil yang dicapai. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, diharapkan implementasi kebijakan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di Kelurahan Pasir Putih.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana atau disposisi yang positif dan proaktif sangat mendukung pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Para birokrat di Kelurahan Pasir Putih, seperti Lurah dan petugas kesehatan, menunjukkan komitmen tinggi dan koordinasi yang baik dengan

berbagai pihak terkait. Pernyataan Pihak kelurahan menunjukkan bahwa ada dukungan kuat dari Pemerintah Kota Depok dan Dinas Kesehatan dalam menangani kasus stunting, yang mencerminkan pentingnya pengangkatan birokrat yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu stunting dan kemampuan manajerial yang baik.

Selanjutnya, intensifikasi berbagai kegiatan juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Hal ini termasuk peningkatan frekuensi kegiatan penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan, serta pelatihan bagi kader Posyandu dan tenaga kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh informan diatas, adanya pelatihan yang bergantian bagi kader PKK membantu menambah wawasan mereka, sehingga mereka lebih siap dalam melaksanakan tugas di lapangan. Pernyataan Ibu Siti juga mendukung pentingnya intensifikasi dengan menyebutkan bahwa berbagai pelatihan dan konseling telah dilakukan untuk mendukung penanganan stunting.

Namun, terdapat juga pendapat yang menunjukkan perlunya peningkatan intensifikasi, seperti yang diungkapkan oleh salah satu orang tua pendamping anak stunting yang merasa bahwa masih belum adanya pertemuan sosialisasi terkait stunting. Ini menunjukkan bahwa meskipun upaya intensifikasi sudah dilakukan, masih ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan frekuensi dan jangkauan kegiatan edukasi dan penyuluhan di masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting. Dua aspek utama dalam struktur birokrasi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab. Kedua elemen ini memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan stunting dilakukan dengan cara yang terstandar dan setiap pihak yang terlibat memahami peran serta tanggung jawab secara jelas.

SOP adalah pedoman yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam menjalankan sebuah proses atau kegiatan. Dalam konteks penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, SOP yang jelas dan terperinci sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP ini mencakup prosedur untuk identifikasi kasus stunting, intervensi gizi, monitoring perkembangan anak, serta pelaporan dan evaluasi hasil.

Keberadaan SOP membantu mengurangi kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program. Setiap petugas, baik itu di puskesmas, posyandu, maupun kader kesehatan, memiliki panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani kasus stunting. SOP yang baik juga harus mencakup prosedur penanganan jika terjadi kendala di lapangan, sehingga setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien.

Berkaitan dengan SOP pemberian gizi, juga ditentukan aturan atau ketentuannya dalam penanganan stunting, dimana Ibu Kader PKK mengungkapkan:

”[Dalam pembuatan porsi itu, ada SOP-nya kan bu, SOP Gizi?], Kita dapet juknisnya dari Kemenkes ada juknisnya. Jadi untuk kelompok umur sekian tuh, berapa kalori, berapa proteinnya gitu, dan kita untuk satu porsi kita takar segitu. Kemudian kita implementasikan ke dalam resep, bahkan menu nya ini, nah takaran segini. Dan itu resep itu kita berikan ke pihak catering, atau punya dia yang masak.

Berkaitan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas juga merupakan faktor kunci dalam struktur birokrasi yang efektif. Setiap pihak yang terlibat dalam program penurunan stunting harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka. Di Kelurahan Pasir Putih, tanggung jawab ini mencakup berbagai pihak, mulai dari pemerintah kelurahan, puskesmas, kader posyandu, hingga masyarakat.

Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, setiap pihak dapat bekerja secara sinergis dan tidak ada tumpang tindih tugas. Misalnya, Puskesmas Pasir

Putih bertanggung jawab dalam intervensi spesifik yang berkaitan langsung dengan balita yang stunting, diungkapkan oleh dr. Ratih, yang menyatakan:

“[Berarti dalam kalau untuk alur struktur organisasinya itu udah udah jelas ya?], Udah jelas, ini kalau Puskemas UPTD ya. UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah, jadi udah Stuktur organisasi nya itu udah jelas ya di Dinkes terus kemudian membawahi juga di Puskesmas. [Jadi sistem informasinya terkait kebijakan stunting itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga udah saling paham yaa ibu untuk koordinasi.], Jadi mungkin ada beberapa yang given yang yang disusulkan langsung dari atas tapi kita juga memberikan masukan gitu buat atas untuk apa namanya kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu dimasukkan gitu di dalam kebijakan ini gitu dari apa ya terkait stunting. Dinas kan emang selalu ngasih feedback atas laporan-laporan kita ya misalnya apa, tingkatkan koordinasi dengan lintas sektor penurunan stunting, terus apa lagi edukasi kepada orang tua balita, rekomendasinya ada dari Dinas, evaluasinya ada setiap kita lakukan pelaporan, rekomendasinya ada setiap triwulan yaa.

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa SOP dan pembagian tanggung jawab merupakan elemen kunci dalam struktur birokrasi yang berjalan di Kelurahan Pasir Putih terkait implementasi kebijakan penurunan stunting. SOP dalam konteks penanganan stunting di Kelurahan Pasir Putih adalah pedoman yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam proses intervensi gizi. SOP ini mencakup berbagai hal, mulai dari identifikasi kasus stunting, pengukuran gizi, hingga penanganan makanan tambahan. Keberadaan SOP memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh petugas kesehatan dan kader posyandu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, proses intervensi gizi dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga meminimalkan kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program.

Contoh dari SOP yang diterapkan adalah prosedur dalam pembuatan porsi makanan untuk balita stunting. Ibu yang bertanggung jawab dalam menyusun menu makanan mengacu pada pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang mencakup informasi mengenai kalori, protein, dan takaran makanan yang sesuai dengan kebutuhan balita. Dengan demikian, SOP ini

membantu memastikan bahwa porsi makanan yang diberikan kepada balita stunting sesuai dengan standar gizi yang diperlukan.

Pembagian tanggung jawab yang jelas antara berbagai pihak juga merupakan faktor penting dalam struktur birokrasi yang efektif. Setiap pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah kelurahan, puskesmas, kader posyandu, hingga masyarakat, memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Misalnya, puskesmas bertanggung jawab dalam intervensi spesifik terhadap balita yang mengalami stunting, seperti pemberian makanan tambahan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Tanggung jawab ini telah dijelaskan dengan rinci oleh dr. Ratih, yang menjelaskan struktur organisasi dan alur kerja di puskesmas. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, setiap pihak dapat fokus pada tugas mereka masing-masing tanpa adanya tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan program.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa SOP dan pembagian tanggung jawab yang jelas sangat penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Dengan adanya SOP, setiap langkah dalam proses intervensi gizi dapat dilakukan secara terstandarisasi, sementara pembagian tanggung jawab yang jelas memastikan bahwa setiap pihak dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani kasus stunting.

Kemudian komitmen dari adanya struktur birokrasi yang baik dalam pelaksanaan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih juga ditunjukkan oleh sikap Pak Lurah Kelurahan Pasir Putih yang dari awal adanya program ini yang menyatakan:

“Pada dasarnya kami, pihak kelurahan pasir putih sangat serius dalam menyikapi kasus stunting yang ada di wilayah pasir putih dan sangat berupaya dengan cara melakukan sosialisasi pada masyarakat dan melakukan Pemberian Makan Tambahan (PMT), agar berkurangnya kasus stunting yang terjadi di pasir putih ini bisa tercapai, itu saja.”

Dari adanya komitmen dan keseriusan dalam penanganan kasus stunting di Kelurahan Pasir Putih ini, masih dari tanggapan yang sama dari Pak Lurah Kelurahan Pasir Putih yang menyatakan kembali dari hasil kolaborasi penanganan stunting yang beliau menyatakan:

“Alhamdulillah, dalam penanganan kasus stunting ini sudah memberikan hasil yang positif dan terjadi pengurangan angka stunting yang ada di Kelurahan Pasir Putih.

Dari pernyataan diatas, terlihat jelas adanya komitmen dan keseriusan yang tinggi dari pihak kelurahan dalam menangani kasus stunting di Kelurahan Pasir Putih. Komitmen ini tercermin dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sebagai bagian dari intervensi untuk mengurangi kasus stunting. Hal ini pemerintah kelurahan tidak hanya menganggap serius masalah stunting, tetapi juga berupaya secara aktif untuk mengatasinya. Selain itu, hasil positif yang telah dicapai dalam penanganan kasus stunting merupakan bukti nyata dari komitmen dan upaya keras pemerintah kelurahan Pasir Putih. Penurunan angka stunting yang terjadi menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak di wilayah Kelurahan Pasir Putih. Dengan demikian, komitmen yang kuat dari pihak kelurahan Pasir Putih telah menghasilkan perubahan positif dalam penanganan kasus stunting. Hal ini menegaskan pentingnya peran serta dan dukungan pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan masalah gizi seperti stunting.

B. Pembahasan

Stunting, atau dikenal sebagai gagal tumbuh, merupakan masalah gizi kronis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani. Kondisi ini, di mana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan standar usianya (Rahayu et al., 2018), disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam jangka panjang atau infeksi berulang. Dampak stunting bukan hanya terhenti pada perawakan pendek, tetapi juga mengancam

perkembangan fisik dan kognitif anak di masa depan (Kemenkes RI, 2018). Jika tidak ditangani dengan serius, stunting dapat menghambat potensi anak untuk mencapai prestasi optimal dan berkontribusi pada kerugian ekonomi jangka panjang bagi bangsa. Stunting, atau dalam bahasa medis disebut stunted growth, adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan seorang anak terhambat atau terhenti karena kurangnya nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan awal mereka, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari masa kehamilan hingga usia dua tahun. Stunting dapat mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek daripada usia sebaya.

Pada dasarnya, stunting adalah indikator utama dari masalah gizi kronis dan defisiensi nutrisi yang berkelanjutan dalam masyarakat. Ini dapat terjadi ketika anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan yang mereka konsumsi atau karena faktor-faktor lingkungan yang merugikan pertumbuhan fisik mereka. Stunting disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Dalam rangka memahami stunting secara menyeluruh, berikut adalah beberapa penyebab utama yang sering dikaitkan dengan kondisi ini. Kesehatan dan nutrisi ibu selama kehamilan memainkan peran kunci dalam perkembangan janin. Kurangnya gizi selama masa kehamilan dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang terhambat dan meningkatkan risiko stunting pada anak. Ibu yang kekurangan gizi selama kehamilan cenderung melahirkan bayi dengan berat badan rendah, yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stunting di kemudian hari.

Pada usia yang sangat muda, bayi dan balita sangat rentan terhadap defisiensi gizi. Jika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, pertumbuhan fisik mereka dapat terhambat. ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup. Namun, di banyak daerah, pemberian ASI eksklusif belum optimal dan banyak bayi diberikan makanan pendamping yang tidak mencukupi kebutuhan gizi mereka. Kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi dan variasi dalam diet anak-anak juga berkontribusi pada stunting. Diet yang didominasi oleh makanan berkalori tinggi

tetapi rendah gizi dapat memperburuk masalah ini. Anak-anak yang tidak mendapatkan asupan protein, vitamin, dan mineral yang cukup dari makanan mereka akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Infeksi yang sering dan penyakit kronis seperti diare kronis dapat menghambat penyerapan nutrisi dan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Anak-anak yang sering sakit menghabiskan energi mereka untuk melawan penyakit daripada untuk pertumbuhan. Selain itu, penyakit seperti diare dapat menyebabkan malabsorpsi nutrisi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan fisik mereka. Kebersihan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi dan diare, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai adalah kunci untuk mencegah infeksi yang dapat mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Di banyak daerah, akses terhadap fasilitas ini masih terbatas, yang berdampak langsung pada status gizi anak-anak.

Faktor lingkungan seperti kemiskinan, akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dapat menjadi penyebab stunting yang signifikan. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses ke makanan bergizi, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai, semua faktor yang berkontribusi terhadap stunting. Kebijakan dan intervensi pemerintah sangat penting dalam penanggulangan stunting. Pemerintah harus memastikan bahwa program gizi yang komprehensif dan berkelanjutan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program ini harus mencakup penyuluhan tentang pentingnya gizi yang baik, distribusi makanan bergizi, serta perbaikan sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan (Lestari, 2023).

Upaya penanggulangan stunting memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Pada akhirnya, penanggulangan stunting bukan hanya tentang memperbaiki tinggi badan anak-anak, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Anak-anak yang terbebas dari stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan produktivitas yang lebih tinggi di masa dewasa. Oleh karena itu, investasi dalam upaya penanggulangan stunting adalah investasi dalam masa depan bangsa.

Upaya penanggulangan stunting membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat luas. Peningkatan edukasi gizi, akses layanan kesehatan yang berkualitas, dan penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai menjadi kunci utama dalam memerangi stunting. Dalam konteks ini, analisis penelitian menggunakan Pendekatan Pelaksanaan Kebijakan menurut Teori Edward III yang diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok dijalankan dan diterapkan. Dengan pendekatan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas program.

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, komunikasi memegang peranan kunci dalam menentukan keberhasilan program. Teori Edward III menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi dan arahan kebijakan disampaikan kepada semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem memahami peran dan tanggung jawabnya serta dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Di Kelurahan Pasir Putih, komunikasi yang baik antara pemerintah kelurahan, puskesmas, kader Posyandu, dan masyarakat telah terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan stunting. Pemerintah setempat melakukan sosialisasi secara berkala

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak. Informasi mengenai kebijakan dan program penanggulangan stunting disampaikan secara jelas dan terstruktur melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pertemuan langsung, media sosial, dan penyebaran brosur edukatif.

Dari hasil penelitian, pada konteks transmisi komunikasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, seperti yang terungkap dalam wawancara. Transmisi informasi mencakup kejelasan dan ketepatan pesan. Komunikasi efektif dalam transmisi informasi terwujud melalui penyampaian pesan yang jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Contohnya, Lurah Pasir Putih dan Ibu Siti menekankan pentingnya penyampaian informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang sederhana adalah kunci dalam mentransmisikan komunikasi program di masyarakat. Menghindari penggunaan bahasa yang rumit atau istilah teknis yang tidak familiar bagi masyarakat dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat secara efektif menjangkau masyarakat secara luas. Puskesmas Pasir Putih, misalnya, menghindari penggunaan istilah teknis yang rumit saat menjelaskan kepada masyarakat tentang stunting dan cara pencegahannya. Hal ini juga berlaku untuk Kader Posyandu yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti saat menyampaikan informasi kepada ibu-ibu hamil dan menyusui.

Transmisi juga erat kaitannya dengan pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan rutin, sosialisasi, media massa, dan media sosial, informasi dapat secara efektif menjangkau seluruh pihak yang terlibat. Misalnya, melakukan pertemuan rutin dengan kader Posyandu, RT, RW, dan masyarakat untuk membahas program stunting. Menjaga keterbukaan dan transparansi dalam penyampaian informasi juga penting dalam konteks transmisi, karena hal ini dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sebagai contoh, Puskesmas Pasir Putih

secara terbuka memberikan informasi tentang perkembangan program stunting kepada masyarakat. Pelibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program stunting di Kelurahan Pasir Putih juga merupakan bagian penting dari proses transmisi. Ini menunjukkan bahwa transmisi informasi tidak hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang interaksi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, transmisi komunikasi menjadi elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting.

Selain itu, konsistensi dalam komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Konsistensi mencakup kesesuaian pesan, yang memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, Puskesmas, kader Posyandu, dan masyarakat, selaras dan tidak berbeda atau kontradiktif. Dalam penelitian ini, semua pihak yang terlibat dalam program stunting menyampaikan pesan yang sama tentang pentingnya pencegahan stunting. Informasi yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi konsisten dan tidak saling bertentangan. Keberlanjutan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam konsistensi. Menjaga keberlanjutan komunikasi dan koordinasi antar pihak penting untuk menciptakan sinergi dan kesatuan dalam mencapai tujuan program stunting. Dalam penelitian ini, berbagai pihak melakukan pertemuan rutin antar pihak yang terlibat dalam program stunting, membangun sistem komunikasi yang efektif untuk memastikan kelancaran koordinasi antar pihak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar stakeholder berjalan dengan baik dan terstruktur. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terstruktur dan koordinasi yang solid antara berbagai pihak di Kelurahan Pasir Putih sangat mendukung implementasi kebijakan penurunan stunting. Keberhasilan komunikasi ini tidak hanya bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, tetapi juga pada mekanisme penyampaian informasi yang efektif, yang memastikan bahwa pesan mengenai pentingnya gizi dan cara-cara mencegah stunting diterima dan dipahami dengan

baik oleh masyarakat. Hal ini menjadi landasan kuat bagi pencapaian tujuan program penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan program stunting dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal dalam mewujudkan zero stunting di Kelurahan Pasir Putih. Dengan demikian, konsistensi dalam komunikasi menjadi kunci penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih.

Koordinasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi elemen krusial. Pemerintah kelurahan, dinas kesehatan, dan puskesmas bekerja sama secara erat dalam merencanakan dan melaksanakan program penurunan stunting. Pertemuan rutin diadakan untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dan untuk menyelaraskan upaya yang dilakukan di lapangan. Hal ini menciptakan sinergi yang positif dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Kader Posyandu memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara puskesmas dan masyarakat. Mereka bertugas memberikan edukasi dan monitoring kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak berisiko stunting. Pelatihan rutin bagi kader-kader ini memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Melalui kader Posyandu, informasi mengenai pentingnya asupan gizi yang baik dan praktik kesehatan yang tepat dapat disampaikan secara langsung dan personal kepada masyarakat.

Selain itu, mekanisme umpan balik dari masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Puskesmas dan kader Posyandu rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan. Hasil dari monitoring ini kemudian dikomunikasikan kembali kepada pihak-pihak terkait untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan bahwa program penurunan stunting tidak hanya bersifat top-down tetapi juga responsif terhadap kondisi di lapangan. Komunikasi yang efektif juga mencakup penyebaran informasi yang jelas dan

mudah dipahami. Dalam hal ini, penggunaan bahasa yang sederhana dan penyampaian yang langsung sangat penting agar pesan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan. Pemerintah kelurahan dan puskesmas menggunakan berbagai metode komunikasi, termasuk pertemuan tatap muka, leaflet, dan media sosial, untuk menjangkau sebanyak mungkin anggota masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian dari strategi komunikasi dalam program ini. Penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan lingkungan. Koordinasi lintas sektor memastikan bahwa setiap aspek yang berkontribusi terhadap penurunan stunting, seperti sanitasi dan pendidikan gizi, ditangani secara komprehensif dan terpadu. Dengan demikian, komunikasi yang baik tidak hanya mencakup penyebaran informasi tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak. Komitmen semua stakeholder untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara rutin menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah stunting. Sinergi yang terjalin ini merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terstruktur dan koordinasi yang solid antara berbagai pihak di Kelurahan Pasir Putih sangat mendukung implementasi kebijakan penurunan stunting. Keberhasilan komunikasi ini tidak hanya bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak tetapi juga pada mekanisme penyampaian informasi yang efektif, yang memastikan bahwa pesan mengenai pentingnya gizi dan cara-cara mencegah stunting diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini menjadi landasan kuat bagi pencapaian tujuan program penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor krusial dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Aspek ini mencakup tenaga manusia (staf), fasilitas, dan informasi yang semuanya berperan penting dalam mendukung efektivitas program. Keberadaan sumber daya yang memadai dan kompeten sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, serta memastikan program penurunan stunting dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Tenaga manusia adalah komponen utama dalam implementasi kebijakan ini. Di Kelurahan Pasir Putih, tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, dan kader Posyandu memegang peran kunci dalam intervensi program stunting. Kompetensi dan pelatihan yang memadai untuk tenaga kesehatan ini sangat penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas mencakup edukasi gizi yang tepat, pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, serta pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan standar gizi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam jumlah tenaga kesehatan serta kompetensi yang belum merata di antara kader Posyandu. Kekurangan ini dapat menghambat efektivitas program penurunan stunting.

Selain staf, fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam penanganan stunting. Fasilitas yang baik mendukung kelancaran proses pemantauan dan intervensi kesehatan. Di Kelurahan Pasir Putih, terdapat fasilitas seperti timbangan digital dan alat ukur tinggi badan yang memadai, namun beberapa fasilitas penting lainnya seperti tempat tidur untuk pemeriksaan ibu hamil masih kurang memadai akibat kerusakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan dan penambahan fasilitas untuk menunjang pelayanan kesehatan yang optimal.

Informasi merupakan aspek sumber daya yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan penurunan stunting. Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta pelaksanaan program yang efektif. Penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya orang tua balita, harus dilakukan secara jelas dan

terstruktur. Metode penyuluhan di posyandu dan kunjungan rumah door-to-door merupakan strategi yang baik untuk memastikan bahwa informasi mengenai pentingnya gizi dan cara mencegah stunting sampai kepada masyarakat. Namun, efektifitas dari metode ini sangat tergantung pada seberapa baik informasi tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih sangat bergantung pada pemenuhan dan pengelolaan sumber daya. Meningkatkan jumlah dan kompetensi staf kesehatan adalah langkah awal yang sangat penting. Pelatihan rutin dan program pengembangan kapasitas bagi kader Posyandu harus terus ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai, termasuk perbaikan alat-alat kesehatan yang rusak, juga harus menjadi prioritas.

Selain tenaga manusia dan fasilitas, pengelolaan informasi juga harus diperhatikan. Informasi harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan berbagai metode komunikasi, seperti penyuluhan di posyandu, kunjungan rumah, dan media sosial, dapat membantu mencapai tujuan ini. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa informasi tersebut diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah stunting.

Secara keseluruhan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya yang mencakup staf, fasilitas, dan informasi adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan program penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Dengan sumber daya yang memadai dan dikelola dengan baik, upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di Kelurahan Pasir Putih. Pengelolaan sumber daya yang baik juga akan memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang maksimal dalam penurunan angka stunting di wilayah Kelurahan Pasir Putih.

c. Sikap Pelaksana/Disposisi

Sikap pelaksana atau disposisi merupakan elemen kunci yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Disposisi pelaksana mencakup dua aspek utama: pengangkatan birokrat yang tepat dan intensif pelaksanaan program. Kedua aspek ini berperan penting dalam motivasi, komitmen, dan kinerja para pelaksana kebijakan di lapangan. Pengangkatan birokrat yang tepat sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penurunan stunting. Di Kelurahan Pasir Putih, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen para birokrat yang bertanggung jawab. Birokrat yang diangkat harus memiliki pemahaman mendalam tentang isu stunting, kemampuan manajerial yang baik, dan dedikasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat didukung oleh dukungan kuat dari Pemerintah Kota Depok dan Dinas Kesehatan, yang menunjukkan pentingnya pengangkatan birokrat yang kompeten dan berintegritas.

Di balik pengangkatan birokrat yang kompeten, intensifikasi pada sikap pelaksana atau disposisi menjadi elemen kunci dalam memaksimalkan efektivitas kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Intensif ini terwujud dalam berbagai upaya, seperti peningkatan frekuensi kegiatan, intensifikasi pelatihan, dan penguatan monitoring dan evaluasi. Peningkatan frekuensi kegiatan, seperti penyuluhan gizi dan pemeriksaan kesehatan, menjadi strategi penting untuk mendeteksi dan menangani kasus stunting lebih dini dan efektif. Seperti yang diungkapkan Ibu Dewi, kader PKK, adanya program pelatihan berkelanjutan membantu mereka dalam meningkatkan wawasan dan kemampuan dalam menjalankan tugas di Posyandu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Siti, petugas gizi Puskesmas, yang menekankan pentingnya pelatihan dan konseling yang melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas gizi, sanitasi lingkungan, dan promosi kesehatan.

Intensif dalam disposisi juga terwujud dalam penguatan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang

dilakukan dapat diukur efektivitasnya dan disesuaikan jika diperlukan. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan para pelaksana untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan penyesuaian strategi agar program dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan intensifikasi. Seperti yang diungkapkan oleh orang tua pendamping anak stunting, masih perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan jangkauan kegiatan edukasi dan penyuluhan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya intensifikasi sudah dilakukan, masih ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan edukasi agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulannya, intensifikasi pada sikap pelaksana atau disposisi menjadi pilar penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Peningkatan frekuensi kegiatan, intensifikasi pelatihan, dan penguatan monitoring dan evaluasi merupakan strategi kunci untuk mencapai target dan memaksimalkan dampak program. Terus melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta memperluas jangkauan edukasi dan penyuluhan, merupakan langkah penting untuk memastikan program stunting di Kelurahan Pasir Putih dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, komitmen dan sikap proaktif para pelaksana sangat terlihat. Para birokrat dan petugas kesehatan menunjukkan komitmen tinggi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Mereka menunjukkan sikap proaktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan pengurangan angka stunting. Hal ini mencerminkan bahwa mereka memiliki disposisi positif dan dedikasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Intensifikasi kegiatan juga terlihat dalam upaya peningkatan pelatihan dan konseling bagi kader Posyandu. Pelatihan yang dilakukan secara bergantian bagi kader PKK membantu menambah wawasan mereka, sehingga mereka lebih siap dalam melaksanakan tugas di lapangan. Pelatihan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penyuluhan gizi dan konseling

tentang cara-cara pencegahan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kesehatan dilakukan secara berkelanjutan.

Namun, terdapat juga tantangan dalam intensifikasi kegiatan. Beberapa anggota masyarakat merasa bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait stunting di tingkat kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya intensifikasi sudah dilakukan, masih ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan frekuensi dan jangkauan kegiatan edukasi dan penyuluhan di masyarakat. Ini adalah area yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerima informasi yang diperlukan untuk mencegah stunting.

Secara keseluruhan, sikap pelaksana atau disposisi yang positif dan proaktif sangat mendukung pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Pengangkatan birokrat yang kompeten dan berintegritas, serta intensifikasi berbagai kegiatan, adalah dua aspek yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan program. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, diharapkan implementasi kebijakan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di Kelurahan Pasir Putih.

Keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih sangat bergantung pada pengangkatan birokrat yang tepat dan intensifikasi pelaksanaan program. Sikap proaktif dan komitmen tinggi dari para pelaksana kebijakan, didukung oleh upaya yang berkelanjutan dalam pelatihan dan konseling, menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan dalam penurunan angka stunting. Namun, peningkatan lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di Kelurahan Pasir Putih.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting. Dua aspek utama dalam struktur birokrasi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab. Kedua elemen ini memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan stunting dilakukan dengan cara yang terstandar dan setiap pihak yang terlibat memahami peran serta tanggung jawab mereka secara jelas.

SOP merupakan pedoman yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam menjalankan sebuah proses atau kegiatan. Dalam konteks penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, SOP yang jelas dan terperinci sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP ini mencakup prosedur untuk identifikasi kasus stunting, intervensi gizi, monitoring perkembangan anak, serta pelaporan dan evaluasi hasil. Keberadaan SOP membantu mengurangi kebingungan dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program. Setiap petugas, baik itu di puskesmas, posyandu, maupun kader kesehatan, memiliki panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani kasus stunting.

Dalam hal penanganan stunting, SOP juga mencakup pedoman dalam pembuatan porsi makanan untuk balita. Pedoman ini mengatur berapa kalori dan protein yang harus ada dalam setiap porsi makanan yang disesuaikan dengan kelompok umur. Dengan adanya SOP yang mengatur hal ini, makanan yang diberikan kepada balita stunting dapat memenuhi kebutuhan gizi yang telah ditentukan. Implementasi SOP ini dilakukan dengan mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang kemudian diaplikasikan dalam penyusunan resep dan takaran makanan yang diberikan oleh pihak yang memasak, seperti catering atau ibu yang memasak sendiri.

Pembagian tanggung jawab yang jelas juga merupakan faktor kunci dalam struktur birokrasi yang efektif. Setiap pihak yang terlibat dalam program penurunan stunting harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka. Di Kelurahan Pasir Putih, tanggung jawab ini mencakup berbagai pihak, mulai dari pemerintah kelurahan, puskesmas, kader posyandu, hingga masyarakat. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, setiap pihak dapat bekerja secara sinergis dan tidak ada tumpang tindih tugas. Misalnya, puskesmas bertanggung jawab dalam intervensi spesifik yang berkaitan langsung dengan balita yang stunting, seperti pemberian makanan tambahan dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Struktur organisasi di puskesmas dan pemerintah kelurahan sudah diatur dengan jelas. Terdapat alur informasi yang mengalir dari tingkat atas ke bawah dan sebaliknya, memungkinkan adanya umpan balik yang konstruktif. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan dan rekomendasi yang diberikan oleh dinas kesehatan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, dan setiap masalah yang ditemukan dapat segera dilaporkan dan ditangani. Kejelasan struktur ini membantu dalam koordinasi lintas sektor yang efektif, yang sangat penting dalam penanganan isu kompleks seperti stunting.

SOP dan pembagian tanggung jawab yang jelas sangat penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Dengan adanya SOP, setiap langkah dalam proses intervensi gizi dapat dilakukan secara terstandarisasi, sementara pembagian tanggung jawab yang jelas memastikan bahwa setiap pihak dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani kasus stunting. Prosedur yang jelas ini tidak hanya membantu dalam pelaksanaan sehari-hari tetapi juga dalam penanganan situasi darurat dan masalah yang muncul di lapangan.

Komitmen dari pemerintah kelurahan juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sikap proaktif dan keseriusan pemerintah kelurahan dalam menangani kasus stunting tercermin dalam berbagai upaya yang mereka

lakukan, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemberian makanan tambahan. Pemerintah kelurahan tidak hanya berkomitmen secara retorik tetapi juga menunjukkan tindakan nyata yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah stunting. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan Pasir Putih serius dalam mencapai pengurangan angka stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak di wilayah mereka.

Hasil positif yang telah dicapai, seperti penurunan angka stunting, merupakan bukti nyata dari efektivitas struktur birokrasi yang baik dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Struktur birokrasi yang solid, didukung oleh SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang tepat, memastikan bahwa setiap intervensi dilakukan secara konsisten dan efektif. Komitmen dan upaya keras dari pemerintah kelurahan dan semua pihak yang terlibat membuahkan hasil yang signifikan, menunjukkan bahwa kebijakan penurunan stunting dapat berhasil jika dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang baik, didukung oleh SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang tepat, merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih. Komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, serta koordinasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan dan sektor terkait, memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.

e. Efektifitas Penanganan Stunting di Kelurahan Pasir Putih

Efektivitas penanganan stunting di Kelurahan Pasir Putih secara holistik tergambar dari integrasi dan implementasi solusi-solusi yang cermat terhadap empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana/disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang terjalin dengan baik melalui pendekatan multipeluruhan, termasuk penyuluhan reguler, pendidikan door-to-door, dan pemanfaatan media sosial, telah membawa pemahaman luas tentang stunting ke

masyarakat. Namun, tantangan muncul terkait pemahaman yang belum merata di semua lapisan masyarakat, terutama terkait dengan pengetahuan tentang stunting dan harapan mengenai makanan bagi anak-anak. Kesulitan mengajak seluruh ibu balita dan ibu hamil datang ke posyandu secara berkala juga menjadi hambatan.

Selanjutnya, pengelolaan sumber daya kesehatan menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas penanganan stunting. Rekrutmen lebih banyak tenaga kesehatan yang kompeten dan pelatihan tambahan bagi kader posyandu memberikan fondasi yang solid. Namun, kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti alat deteksi stunting, menghadirkan tantangan tersendiri. Alokasi dana khusus untuk perbaikan dan pengadaan peralatan medis, serta kerja sama dengan sektor swasta, menjadi langkah strategis dalam mengatasi hambatan tersebut.

Sikap dan disposisi para pelaksana menjadi penentu penting dalam kesuksesan program penanganan stunting. Pelatihan motivasi dan peningkatan kapasitas menjadi sarana untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman mereka. Penghargaan dan pengakuan atas dedikasi tinggi dalam program juga menjadi pendorong motivasi yang efektif. Namun, proaktifitas dalam menangani kasus stunting masih menjadi persoalan. Dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, serta rotasi tugas yang teratur, diharapkan para pelaksana dapat tetap termotivasi dan fokus dalam menjalankan tugas mereka.

Terakhir, struktur birokrasi yang efektif memainkan peran penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program. Ketersediaan SOP yang jelas dan terperinci menjadi landasan yang kuat dalam memastikan konsistensi dan standarisasi dalam tindakan. Pembagian tanggung jawab yang jelas antarpihak juga menghindarkan tumpang tindih dan kebingungan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, kolaborasi yang sinergis antara berbagai lembaga dan pihak terkait menjadi mungkin, menjadikan penurunan angka stunting di Kelurahan Pasir Putih sebagai cerminan efektivitas strategi yang diimplementasikan.

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, pemenuhan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang baik. Pertama, komunikasi yang efektif antara pemerintah kelurahan, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci dalam menyebarluaskan informasi penting terkait stunting dan intervensi yang diperlukan. Kampanye penyuluhan gizi dan program sweeping door-to-door telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting. Kedua, sumber daya yang memadai, termasuk jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, fasilitas yang memadai, dan akses informasi yang tepat waktu, sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan program. Kekurangan tenaga kesehatan dan kurangnya pemahaman dalam penanganan stunting merupakan tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan pelatihan dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Selanjutnya, sikap pelaksana atau disposisi yang positif dan proaktif juga memainkan peran penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Komitmen tinggi dari para birokrat dan tenaga kesehatan di Kelurahan Pasir Putih, didukung oleh dukungan intensif dari pemerintah kota dan dinas kesehatan, menunjukkan bahwa motivasi dan kinerja yang baik dapat mempercepat pencapaian tujuan program. Terakhir, struktur birokrasi yang efisien, dengan SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang tepat, memastikan bahwa setiap langkah intervensi dilakukan secara konsisten dan sesuai standar. Pembagian peran yang jelas antara pemerintah kelurahan, puskesmas, dan kader posyandu memungkinkan koordinasi yang baik dan respons cepat terhadap masalah yang muncul di lapangan. Kombinasi dari komunikasi efektif, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang baik menghasilkan dampak yang signifikan dalam penurunan angka stunting di Kelurahan Pasir Putih.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada 7 informan kunci yang dipilih secara purposif, masing-masing memiliki peran dan keterlibatan langsung dalam penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Dari penelitian ini, ditemukan beberapa kendala dalam dinamika pelaksanaan program penurunan stunting. Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, berikut adalah alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk pemecahan masalah ini. Harapannya, solusi ini dapat meningkatkan efektivitas program penurunan stunting dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kelurahan Pasir Putih. Berikut adalah sintesis pemecahan masalah dari penelitian ini:

1) Komunikasi

Persoalan utama dalam komunikasi terkait dengan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih adalah kurangnya pemahaman orang tua tentang apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Hal ini menjadi kendala serius karena kesadaran orang tua tentang kondisi stunting dan langkah-langkah pencegahannya merupakan langkah awal yang penting dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, sulitnya pemahaman orang tua balita jika terkena stunting serta ekspektasi mereka terhadap jenis makanan yang dibutuhkan untuk mengatasi stunting juga menjadi perhatian utama. Kemudian, sulitnya keseluruhan para Ibu balita dan Ibu hamil untuk datang ke posyandu secara rutin juga merupakan kendala serius dalam komunikasi yang perlu ditangani dengan solusi yang tepat. Tidak hanya itu, setelah dilakukan komunikasi secara berulang melalui berbagai media, masih sedikit yang datang ke posyandu, meskipun sudah diberikan informasi melalui grup dan status *WhatsApp*, menjadi tantangan tambahan yang harus diatasi.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan berbagai langkah strategis. Pertama, meningkatkan kampanye penyuluhan dan edukasi dengan menyebarkan informasi tentang stunting dan pencegahannya melalui berbagai media, seperti posyandu, media sosial, dan pertemuan komunitas. Kedua, pendekatan personal melalui program pendidikan *door-to-door* dengan mengirim petugas kesehatan atau

kader untuk memberikan informasi langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Ketiga, memanfaatkan sistem informasi terintegrasi seperti SMS blast atau aplikasi kesehatan untuk memberikan update rutin dan informasi penting mengenai pencegahan stunting. Keempat, melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang stunting dan cara pencegahannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program penurunan stunting dapat ditingkatkan, serta pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perawatan kesehatan anak dan ibu hamil dapat tercapai.

2) Sumber Daya

Kekurangan tenaga kesehatan yang kompeten menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penurunan stunting. Solusi untuk masalah ini termasuk merekrut lebih banyak tenaga kesehatan yang berkualitas dan memberikan pelatihan khusus bagi kader posyandu serta tenaga kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan di setiap posyandu dan puskesmas, lalu melakukan rekrutmen yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah rawan stunting juga dapat meningkatkan motivasi dan retensi mereka.

Di samping kekurangan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang tidak memadai juga menjadi kendala serius dalam penanganan stunting. Terdapat posyandu dan puskesmas yang tidak dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk mendeteksi dan menangani kasus stunting. Oleh karena itu, alokasi dana khusus untuk perbaikan dan pengadaan fasilitas kesehatan seperti ruangan dan kamar tidur bagi Ibu Hamil dan alat diagnostik lainnya perlu dilakukan. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dapat menjadi solusi efektif dengan memperoleh bantuan fasilitas dan peralatan medis yang diperlukan melalui program kemitraan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. Dengan langkah-langkah ini,

diharapkan infrastruktur kesehatan di tingkat lokal dapat diperkuat sehingga penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

3) Sikap Pelaksana/Disposisi

Persoalan terkait sikap pelaksana menunjukkan adanya kurangnya komitmen dari beberapa petugas yang mungkin kurang termotivasi atau tidak memahami pentingnya program penurunan stunting. Hal ini dapat menghambat efektivitas dari upaya penanganan stunting secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, selain pelatihan motivasi dan peningkatan kapasitas secara berkala, perlu juga dilakukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan terhadap petugas yang kurang termotivasi. Pendekatan ini dapat melibatkan sesi diskusi kelompok atau konseling individu untuk memahami lebih dalam mengenai hambatan-hambatan yang mereka alami dalam menampilkan komitmen. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pelaksana yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam program penurunan stunting juga dapat memotivasi mereka, baik berupa penghargaan formal maupun apresiasi informal dari atasan atau rekan kerja.

Di samping kurangnya komitmen, beberapa pelaksana mungkin tidak cukup proaktif dalam mencari dan menangani kasus stunting. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat menjadi langkah krusial dalam memastikan pelaksana bertanggung jawab atas tugas mereka. Monitoring yang rutin dan evaluasi berkala akan memungkinkan identifikasi cepat terhadap kinerja yang kurang optimal serta pelaksana yang tidak proaktif. Selain itu, melakukan rotasi tugas secara periodik dapat membantu menjaga tingkat motivasi pelaksana, menghindarkan mereka dari kejenuhan, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan yang lebih luas. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelaksana dapat lebih terfokus, termotivasi, dan proaktif dalam menangani kasus stunting, sehingga upaya penurunan stunting dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

4) Struktur Birokrasi

Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan stunting dapat mengakibatkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam upaya penurunan stunting. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan pengembangan dan distribusi SOP yang terperinci untuk semua tahapan penanganan stunting, mulai dari identifikasi hingga intervensi dan pelaporan. SOP yang terperinci akan memberikan panduan yang jelas bagi petugas kesehatan dan kader posyandu dalam menjalankan tugas mereka dengan konsisten dan efektif. Selain itu, workshop dan sosialisasi yang intensif tentang SOP kepada semua pihak yang terlibat juga sangat diperlukan. Dengan cara ini, akan tercipta pemahaman yang seragam dan penerapan yang konsisten terhadap prosedur penanganan stunting di semua tingkatan.

Di samping itu, masalah terkait pembagian tanggung jawab yang tidak jelas antara berbagai pihak yang terlibat juga perlu segera diatasi. Untuk mengatasi masalah ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat peta tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk semua pihak terkait, termasuk pemerintah kelurahan, puskesmas, dan kader posyandu. Hal ini harus disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak agar mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Dengan pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tercipta sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak dalam melaksanakan program penurunan stunting. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus stunting serta mengurangi potensi tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan program.

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi persoalan-persoalan ini melalui solusi-solusi konkret yang terfokus, implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Pasir Putih dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka stunting di Kelurahan Pasir Putih.